



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja pada setiap SKPD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Rencana Kerja dibuat sebagai pedoman kerja bagi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya berdasarkan Rencana Setrategis (RENSTRA), maka rencana kerja tahunan SKPD dapat disusun dengan baik, sehingga program dan kegiatan yang dibuat untuk satu tahun kedepan lebih rinci dan terarah.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan dan karunianya, sehingga Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Renja SKPD merupakan amanah dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun. Kepala DPMD Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun berkewajiban menyusun Renja SKPD dengan berpedoman kepada RENSTRA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sarolangun.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini, akhir kata semoga Renja SKPD ini dapat berguna dan bermanfaat.

Sarolangun, Juli 2022

KEPALA DPMD
KABUPATEN SAROLANGUN

MULYADI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670121 198810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran	28
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	29
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	29
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	29
4.3 Prioritas Perangkat Daerah.....	29
BAB 5 PENUTUP	32
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	32
5.2 Rencana tindak lanjut	#

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022.....	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sarolangun.....	12
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 20## Kabupaten Sarolangun	23
Tabel 2.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 20## dan Prakiraan Maju Tahun 20##.....	28
Tabel 2.5	Prioritas Perangkat Daerah	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sebagai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renja SKPD adalah dokumen SKPD untuk priode 1 (Satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana awal RKPD dan dasar- dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja SKPD pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun 2023-2026, yang memuat program dan kegiatan prioritas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara formal diformulasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Renja ini selanjutnya akan merupakan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sebagai berikut :

1. Landasan Idil, yaitu Pancasila.
2. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muarao Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
 - e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
 - f. Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - g. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Merupakan kerangka kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan tuga pokok dan fungsinya selama Satu Tahun Anggaran, sesuai dengan sasaran kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun.
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efesien dan berkelanjutan.
4. Menyediakan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Recana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun.

2. Menyediakan pedoman atau acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten maupun APBN.
3. Sebagai acuan dalam menyusun RKA dan DPA DPMD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 ini adalah sebaga berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 di topang oleh beberapa program kegiatan yang terdapat pada masing-masing bidang, adapun evaluasi kegiatan dan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten / Kota

Pada pelaksanaan program kegiatan ini di anggarakan dana total sebesar Rp. 4.222.493.843,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 540.507.000,- atau sebesar 12,80 %, kegiatan yang di lakasanakan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Pada pelaksanaan program kegiatan ini di anggarakan dana total sebesar Rp. 25.019.783,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 2.100.000,- atau sebesar 8,39 %, kegiatan yang di lakasanakan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pada pelaksanaan program kegiatan ini di anggarakan dana total sebesar Rp. 4.315.853.653,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 323.904.000,- atau sebesar 7,50 %, kegiatan yang di lakasanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat & Masyarakat Hukum Adat

Pada pelaksanaan program kegiatan ini di anggarakan dana total sebesar Rp. 274.174.183,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 3.210.000,- atau sebesar 1,17%, kegiatan yang di lakasanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

TABEL T - C. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja capaian Program Tahun 2019 (Ribuan)	Realisasi Target Kinerja capaian Program Tahun 2019 (Ribuan)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (Ribuan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD 2022	
					Target Renja Tahun 2020 (Ribuan)	Realisasi Renja Tahun 2020 (Ribuan)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	4			5			6	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA									
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas PMD						3.693.756		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perangkat Daerah Dinas PMD						16.633		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA Dinas PMD						5.386		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Dok. Laporan capaian Kinerja dan khtisar realisasi Kinerja Dinas PMD						5.090		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMD						9.243		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas PMD						2.907.931		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan Gaji dan tunjangan ASN						2.907.931		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan						-		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur						8.980		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat						8.980		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran						211.084		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Penerangan bangunan kantor						4.827		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor						2.794		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia						39.998		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan Penggandaan						13.256		
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia						4.845		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah						138.563		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Facilitasi dukungan pelaksanaan SPBE Dinas PMD						6.800		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya Administrasi Perkantoran						-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor, jumlah pengadaan AC						-		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran						479.460		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia						3.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan						74.900		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan						401.560		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang penunjang kegiatan kantor						49.950		
	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional						49.950		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat						-		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja									
II	PROGRAM PENATAAN DESA									
	Penyelenggaraan Penataan Desa									
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa						-		
	Facilitasi Tata wilayah Desa	Terlaksananya Facilitasi Tata wilayah Desa						-		
	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Facilitasi Penataan Kewenangan Desa						-		
	Facilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Facilitasi Penamaan dan Kode Desa						-		
	Facilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Facilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota						-		
	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa						-		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja									
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA									
	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah desa						23.989		
	Kegiatan Facilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa						23.989		
	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi kawasan perdesaan						-		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja									
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
								3.522.558		

1	2	4			5			6	9	10
1	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah desa						3.522.558		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina penyelenggaraan ADM pemerintah desa						99.994		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa						5.670		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa								
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa						671.410		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Bumdes yang dilakukan pembinaan						149.995		
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades						2.319.400		
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan						39.996		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang di data dan evaluasi perkembangan dan jumlah dokumen profil desa						99.850		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah yang difasilitasi aset desa						39.990		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan						-		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi perkembangan dan lomba desa						96.253		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja									
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA							991.834		
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan						991.834		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya						91.755		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah usaha ekonomi masyarakat desa						99.996		
	Fasilitasi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang dilombakan dan jumlah TTG yang di manfaatkan						118.165		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya						99.956		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gearakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	Jumlah desa yang difasilitasi dan pembinaan						581.960		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									
	Predikat kinerja									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		898.617	849.381	773.460	274.817	36		1.124.198	281.050
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar per tahun / perlembar	3.000	3.000	3.000	1.488	50		4.488	1.122
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran rekening (bln)	84.457	63.527	80.000	28.105	35		91.632	22.908
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	180.960	180.960	213.960	89.150	42		270.110	67.528
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	3.000	3.000	3.000	3.000	100		6.000	1.500
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	40.000	40.000	30.000	12.830	43		52.830	13.208
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	18.000	18.000	10.000	7.685	77		25.685	6.421
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Penerangan bangunan kantor	5.000	5.000	5.000	3.000	60		8.000	2.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/ tamu	53.200	53.200	30.000	6.378	21		59.578	14.895
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	305.000	276.694	169.500	36.471	22		313.165	78.291
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	171.000	171.000	204.000	81.000	40		252.000	63.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	35.000	35.000	25.000	5.710	23		40.710	10.178
	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		1.063.000	1.025.440	128.000	33.480	26		1.058.920	264.730
	Pengadaan Printer	Jumlah Pengadaan Printer	5.000	4972	-	-	-		4.972	1.243
	Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah Pengadaan Alat-alat Studio	10.000	-	-	-	-		-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	60.000	60.000	-	-	-		60.000	15.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	60.000	60.000	33.000	10.000	30		70.000	17.500
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	67.000	63.581	70.000	19.080	27		82.661	20.665
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-		-	-
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Elektronik Kantor	Jumlah Pemeliharaan Alat-alat Elektronik Kantor	3.000	3.000	5.000	4.400	88		7.400	1.850
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	400.000	399.131	-	-	-		399.131	99.783
	Pengadaan Komputer	Jumlah Pengadaan Komputer	-	-	-	-	-		-	-
	Pengadaan Meubelair (Kursi rapat)	Jumlah Pengadaan Meubelair	25.000	24.942	-	-	-		24.942	6.236

1	2	4			5			6	9	10
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000	-	20.000	-	-		-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	20.000	10.981	-	-	-		10.981	2.745
	Pembuatan Interior Ruang Aula	Jumlah Pembuatan Interior ruang Aula	200.000	199.430	-	-	-		199.430	49.858
	Pengadaan Jaringan Internet	Jumlah Jaringan Internet	3.000	-	-	-	-		-	-
	Rehabilitas Sedang / berat balai adat Kabupaten Sarolangun	Jumlah Rehabilitasi sedang / berat balai adat	200.000	199.403	-	-	-		199.403	49.851
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	-	-		-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-		-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		123.400	123.400	50.000	7.300	15		130.700	32.675
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	123.400	123.400	50.000	7.300	15		130.700	32.675
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		25.000	23.992	20.000	2175	11		26.167	6.542
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan	25.000	23.992	20.000	2175	11		26.167	6.542
	Penyusunan Lakip OPD	Jumlah jenis laporan	-	-	-	-	-		-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah		30.000	30.000	30.000	-	-		30.000	7.500
	Pameran Pembangunan	Jumlah pameran yang diadakan	15.000	15.000	15.000	-	-		15.000	3.750
	Pawai Pembangunan	Jumlah pawai pembangunan yang diadakan	15.000	15.000	15.000	-	-		15.000	3.750
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		676.000	672.282	2.969.400	138.473	5		810.755	202.689
	Lomba Desa	Jumlah desa yang dilombakan	160.000	159.999	150.000	29.741	20		189.740	47.435
	Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah desa yang dicanangkan pada BBGRM	120.000	119.488	280.000	5.883	2		125.371	31.343
	Pemutakhiran Profil Desa	Tersedianya jumlah buku profil desa	107.000	106.971	99.400	24.877	25		131.848	32.962
	Tim Fasilitas Kabupaten dan Kecamatan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah desa yang difasilitasi Alokasi Dana Desa	-	-	-	-	-		-	-
	Tim Fasilitas Kabupaten dan Kecamatan Dana Desa (DD)	Jumlah desa yang difasilitasi Dana Desa	80.000	79.772	42.000	7.505	18		87.277	21.819
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD dan DD	Tersedianya buku Juknis ADD dan DD	36.000	33.325	25.000	25.000	100		58.325	14.581
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2DK	Tersedianya buku Juknis P2DK	18.000	18.000	-	-	-		18.000	4.500
	Pembinaan dan Konsultasi P2DK	Jumlah Desa yang dibina	35.000	34.954	70.000	16.975	24		51.929	12.982
	Pembinaan dan Konsultasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD	Jumlah Desa yang dibina	120.000	119.772	103.000	24.893	24		144.665	36.166
	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah lembaga desa yang dibina	-	-	-	-	-		-	-
	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa E-Voting	Jumlah desa yang mengadakan pilkades	-	-	-	-	-		-	-
	Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa terpilih 2018	Jumlah Kades terpilih yang dilatih awal masa jabatan	-	-	50.000	-	-		-	-
	Pelaksanaan Pemilihan Kades E-Voting dan Pelantikan Kades	Jumlah desa yang mengadakan pemilihan dan pelantikan kades terpilih	-	-	2.150.000	3.600	0		3.600	900
	Tenaga Administrasi Pemutakhiran Profil Desa	Jumlah tenaga administrasi profil desa	-	-	-	-	-		-	-
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		200.000	198.404	276.200	33.080	12		231.484	57.871
	Pembinaan Posyantek dan Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang dibina	50.000	48.403	46.100	6.393	14		54.796	13.699
	Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna	Jenis Alat yang diperagakan	150.000	150.000	150.100	4.400	3		154.400	38.600
	Pembinaan Pokma Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pokmas yang dibina	-	-	-	-	-		-	-
	Pelatihan Pengurus BUMDES	Jumlah BUMDES yang dibina	-	-	80.000	22.287	28		22.287	5.572
	Pembinaan Posyantek Desa	Jumlah Posyantek Desa	-	-	-	-	-		-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		545.135	500.660	205.000	46.560	23		547.220	136.805
	Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Bntek	-	-	-	-	-		-	-
	Sosialisasi dan Informasi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Desa (ADD) dan P2DK	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi	50.000	29.205	45.000	-	-		29.205	7.301
	Sosialisasi BUMDES	Jumlah desa yang belum mengikuti sosialisasi	100.000	99.961	-	-	-		99.961	24.990
	Rapat Koordinasi Kepala Desa / Lurah	Jumlah Kades / Lurah yang mengikuti Rakor	125.000	111.793	100.000	46.560	47		158.353	39.588
	Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	105.000	104.595	-	-	-		104.595	26.149

1	2	4	5	6	9	10			
	Pembinaan Perangkat Desa dan BPD	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang dilatih	85.000	75.250	60.000	-	-	75.250	18.813
	Inventarisasi Aset PNPMP/Integrasi dan SPP PNPMP/Integrasi	Terdatanya Aset PNPMP/Integrasi dan PKKPM	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan tentang Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang ikut sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-
	Rakor Lembaga Adat Kabupaten	Jumlah Lembaga adat yang ikut	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Kepala Desa dan Sekretaris Desa	Jumlah kades dan sekdes yang mengikuti Bimtek	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi P2DK	Jumlah Kades yang mengikuti Sosialisasi	50.000	50.000	-	-	-	50.000	12.500
	Peningkatan Kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kader KPMD	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas PNPMP	Jumlah Kelompok PNPMP yang dibina	30.135	29.856	-	-	-	29.856	7464
	Monitoring dan Pembinaan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang dibina	-	-	-	-	-	-	-
	Tim Pembentukan Pelembagaan, Pemekaran dan Penghapusan Desa	Jumlah desa yang terdapat	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		1.153.070	1.108.168	1.878.417	78.925	4	1.187.093	296.773
	Dana Penunjang Sekretariat TP PKK Kab. Sarolangun	Tersedianya Dana Penunjang Sekre TP-PKK	545.500	517.104	470.417	71.775	15	588.879	147.220
	Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten	Jumlah Kader PKK yang dilombakan Tk. Kabupaten	95.000	95.000	96.000	1.335	1	96.335	24.084
	Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi	Jumlah Kader PKK yang dilombakan Tk. Provinsi	110.000	110.000	115.000	-	-	110.000	27.500
	Jambore Kader PKK Tingkat Nasional	Jumlah Kader PKK yang dilombakan Tk. Nasional	126.000	112.808	130.000	-	-	112.808	28.202
	HKG Tingkat Kabupaten	Pelaksanaan HKG PKK Tk. Kabupaten	25.000	24.995	26.000	-	-	24.995	6.249
	HKG Tingkat Provinsi	Pelaksanaan HKG PKK Tk. Provinsi	27.000	26.275	28.000	-	-	26.275	6.569
	HKG Tingkat Nasional	Pelaksanaan HKG PKK Tk. Nasional	60.000	59.999	62.000	-	-	59.999	15.000
	Rakor TP. PKK Desa/Kelurahan seKabupaten Sarolangun	Jumlah TP. PKK yang mengikuti Rakor	24.070	23.049	25.000	-	-	23.049	5.762
	Sosialisasi Pola Asuh anak dan Remaja	Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	21.000	20.730	22.000	2.742	12	23.472	5.868
	Sosialisasi UP2K Tingkat Kabupaten	Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	23.500	23.465	25.000	2.229	9	25.694	6.424
	Sosialisasi Hafinya PKK	Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	23.000	22.950	24.000	-	-	22.950	5.738
	Lomba Masak	Terlaksananya Lomba Masak	10.000	9.550	11.000	-	-	9.550	2.388
	Sosialisasi Posyandu	Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	23.000	22.995	24.000	-	-	22.995	5.749
	Lomba 10 Program Pokok PKK	Jumlah Kader yang mengikuti lomba	20.000	20.000	21.000	474	2	20.474	5.119
	Lomba Busana	Jumlah Kader yang mengikuti lomba busana	20.000	19.248	21.000	370	2	19.618	4.905
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		398.000	397.825	389.000	35.610	9	433.435	108.359
	Lomba P2W-KSS	Jumlah Desa yang dilombakan	263.000	262.872	264.000	20.659	8	283.531	70.883
	Lomba Posyandu	Jumlah Desa yang dilombakan	100.000	100.000	125.000	14.952	12	114.952	28.738
	Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat	Jumlah Desa yang dilombakan	35.000	34.953	-	-	-	34.953	8.738
	Program Pengembangan Nilai Budaya		356.000	354.849	197.280	30.353	15	385.202	96.301
	Operasional Sekretariat Lembaga Adat Kabupaten	Tersedianya Operasional lembaga adat	150.000	149.962	95.000	8.054	8	158.016	39.504
	Penyuluhan Hukum Adat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	69.000	68.907	64.000	13.400	21	82.307	20.577
	Rapat Kerja Pengurus Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah pengurus lembaga adat kabupaten dan kecamatan	42.000	42.000	38.280	8.900	23	50.900	12.725
	Workshop Lembaga Adat	Jumlah anggota lembaga adat yang mengikuti workshop	-	-	-	-	-	-	-
	Insentif Pengurus Penyelesaian Sengketa Adat	Jumlah sengketa adat yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Gelar Adat dan Pengukuhan Gelar Adat	Terlaksananya Gelar Adat dan pengukuhan gelar adat	80.000	78.980	-	-	-	78.980	19745
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan lembaga adat	Jumlah peralatan dan perlengkapan lembaga adat	15.000	15.000	-	-	-	15.000	3750
	Penyuluhan Adat ke sekolah-sekolah	Jumlah sekolah yang diadakan penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-
	Sarana dan prasarana pusat informasi cagar budaya	Tersedianya sarana dan prasarana pusat informasi cagar budaya	-	-	-	-	-	-	-
	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Percepatan Pembangunan Desa / Kelurahan (P2DK), ADD dan DD		1.035.000	826.066	260.760	46.141	18	872.207	218.052
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	60.000	57.511	60.000	-	-	57.511	14.378
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK)	Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	65.000	64.661	50.000	6.781	14	71.442	17.861

1	2	4	5	6	9	10				
	Pendampingan Program Percepatan Pembanguna Desa / Kelurahan P2DK	Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	800.000	599.445	100.000	27.870	28		627.315	156.829
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	-	-	-	-	-		-	-
	Monitoring Pembinaan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang monitoring dan dibina	-	-	50.760	-	-		-	-
	Monitoring Pemilih Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti pemilihan	-	-	-	-	-		-	-
	Pembinaan dan Pengawasan TKD Sawit	Jumlah TKD sawit yang dibina	-	-	-	-	-		-	-
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PNP dan PKPM	Jumlah Desa yang di bina	60.000	59.627	-	-	-		59.627	14906,75
	Koordinasi Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah Desa yang mendapat bantuan keuangan prov	50.000	44.822	-	-	-		44.822	11205,5
	Program Fasilitas Purna Tugas Kepala Desa		100.000	99.911	100.000	50.000	50		149.911	37.478
	Penghargaan Purna Tugas kepala Desa	Jumlah Kades yang diberi penghargaan	100.000	99.911	100.000	50.000	50		149.911	37.478
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		75.000	74.037	-	-	-		74.037	18.509
	Fasilitasi Evaluasi Penyusunan APBDes	Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes	-	-	-	-	-		-	-
	Fasilitasi Pendampingan Desa	Jumlah Desa yang ikut pendampingan	45.000	44.039	-	-	-		44.039	11.010
	Rakor Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa dan PLD	Jumlah Desa yang ikut rakor pendampingan	30.000	29.998	-	-	-		29.998	7.500
	Pembinaan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah BPD yang dilatih	-	-	-	-	-		-	-
	Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan		-	-	-	-	-		-	-
	Inventarisasi Dats dan Pengukuran TKD Non Sawit	Jumlah TKD non sawit yang di ukur	-	-	-	-	-		-	-
	Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA Desa	Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan	-	-	-	-	-		-	-
	Tim Pembentukan Pemetaan, Pemekaran dan Penghapusan Desa	Jumlah desa yang dimekarkan dan dihapus	-	-	-	-	-		-	-
	Program Pengembangan Usaha Masyarakat Desa		-	-	130.000	34.171	26		34.171	8.543
	Fasilitasi Pembentukan BUMDES	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	-	-	130.000	34.171	26		34.171	8.543
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang dikembangkan	-	-	-	-	-		-	-
	Pengembangan Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang dikembangkan	-	-	-	-	-		-	-
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Aktivitas Ruang Belajar Masyarakat		-	-	-	-	-		-	-
	Fasilitasi Perpustakaan Desa	Jumlah Perpustakaan Desa yang difasilitasi	-	-	-	-	-		-	-
	Penguatan Kelembagaan Aktifitas Belajar Masyarakat	Terciptanya minat baca masyarakat desa	-	-	-	-	-		-	-
	Program Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan		-	-	-	-	-		-	-
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang dibina	-	-	-	-	-		-	-
	Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa		30.000	29.148	50.000	13.603	27		42.751	10.688
	Pembinaan dan Fasilitas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dan Desa (ADD)	Jumlah Desa yang dibina dan difasilitasi	-	-	-	-	-		-	-
	Pembinaan Dana Bantuan Provinsi	Jumlah Desa yang dibina	30.000	29.148	50.000	13.603	27		42.751	10.688

Sarolangun, Juli 2022

KEPALA DINAS PMD
KAB. SAROLANGUN

MULYADI, S.Sos.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670121 198810 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

TABEL T - C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Program / Kegiatan	SPM / STANDAR NASIONAL	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Ribu)	Tahun 2021 (Ribu)	Tahun 2022 (Ribu)	Tahun 2023 (Ribu)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.450.490					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.693.756	422.494	4.222.490		2.117.587			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas PMD		36.352	9.900	9.900		22.053			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perangkat Daerah Dinas PMD		16.633	-	9.900		7.080			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Penyusunan DPA Dinas PMD		5.386	-	-		1.900			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD		Dok. Laporan capaian Kinerja dan Khisar realisasi Kinerja Dinas PMD		5.090	-	-		3.335			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dok. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMD		9.243	-	-		6.339			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas PMD		2.907.931	3.503.127	3.503.130		2.431.629			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan Gaji dan tunjangan ASN		2.907.931	3.503.127	3.498.130		2.431.629			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		-	-	5.000		-			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur		8.980	-	-		6.030			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		8.980	-	-		6.030			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran		211.084	114.889	114.090		160.672			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Penerangan bangunan kantor		4.827	2.000	5.000		3.422			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		2.794	-	-		2.565			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis ATK yang tersedia		39.998	2.077	2.080		31.597			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Jenis barang cetak dan Penggandaan		13.256	1.799	1.000		11.452			
	Facilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		4.845	6.010	6.010		4.845			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah		138.563	100.000	100.000		104.391			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD		Facilitasi dukungan pelaksanaan SPBE Dinas PMD		6.800	-	-		2.400			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran		-	-	-		-			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah tersedianya peralatan gedunga kantr, jumlah pengadaan AC		-	-	-		-			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran		479.460	535.373	536.170		448.683			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materi dan benda pos lainnya yang tersedia		3.000	5.434	5.340		1.550			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan		74.900	87.619	87.510		54.703			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan		401.560	442.320	443.320		392.430			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya barang penunjang kegiatan kantor		49.950	59.205	59.210		48.520			
	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		Jumlah kendaraan dinas operasional		49.950	54.200	54.200		48.520			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terawat		-	5.005	5.010		-			
	Rata-rata capaian kinerja (%)											
	Predikat kinerja											
II	PROGRAM PENATAAN DESA				-	-	-		970.000			
	Penyelenggaraan Penataan Desa				-	-	-		970.000			
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa		Terlaksananya Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa		-	-	300.000		-			
	Facilitasi Tata wilayah Desa		Terlaksananya Facilitasi Tata wilayah Desa		-	-	-		-			
	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa		Terlaksananya Facilitasi Penataan Kewenangan Desa		-	-	50.000		-			
	Facilitasi Penamaan dan Kode Desa		Terlaksananya Facilitasi Penamaan dan Kode Desa		-	-	20.000		-			
	Facilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Facilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-		-			
	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Terlaksananya Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa		-	-	600.000		-			
	Rata-rata capaian kinerja (%)											
	Predikat kinerja											
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				23.989	25.020	175.000		22.680			
	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah desa		23.989	25.020	175.000		22.680			
	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa		23.989	25.020	25.000		22.680			
	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah desa yang difasilitasi kawasan perdesaan		-	-	150.000		-			
	Rata-rata capaian kinerja (%)											
	Predikat kinerja											
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				3.522.558	4.315.854	2.683.000		2.913.967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah desa		3.522.558	4.315.854	2.683.000		2.913.967			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang dibina penyelenggaraan ADM pemerintah desa		99.994	-	30.000		85.992			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah produk hukum desa		5.670	29.228	50.000		5.670			
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				57.000		-			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa		671.410	2.025.714	2.176.000		252.821			
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				100.000		-			
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa		Jumlah Bumdes yang dilakukan pembinaan		149.995	42.789	60.000		132.431			
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades		2.319.400	2.084.120	-		2.214.654			
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan		39.996	28.999	-		-			
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah desa yang di data dan evaluasi perkembangan dan jumlah dokumen profil desa		99.850	50.003	80.000		99.152			
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah yang difasilitasi aset desa		39.990	25.003	50.000		27.587			
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan		-	-	50.000		-			
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitasi perkembangan dan lomba desa		96.253	29.998	30.000		95.659			
	Rata-rata capaian kinerja (%)											
	Predikat kinerja											
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA				991.834	274.174	1.400.000		869.399			
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan		991.834	274.174	1.400.000		869.399			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya		91.755	91.998	90.000		91.245			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah usaha ekonomi masyarakat desa		99.996	23.655	40.000		76.447			
	Fasilitasi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah TTG yang dilombakan dan jumlah TTG yang di manfaatkan		118.165	8.522	200.000		84.273			
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya		99.956	24.999	-		95.581			
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga		Jumlah desa yang difasilitasi dan pembinaan		581.960	125.000	1.000.000		521.854			
	Rata-rata capaian kinerja (%)											
	Predikat kinerja											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				773.460				274.817			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Keluar per tahun / perlembar		3.000				1.488			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Pembayaran rekening (bin)		80.000				28.105			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan		213.960				89.150			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor		3.000				3.000			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis ATK		30.000				12.830			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan		10.000				7.685			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Penerangan bangunan kantor		5.000				3.000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah peserta rapat/ tamu		30.000				6.378			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		169.500				36.471			
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga Administrasi Perkantoran		204.000				81.000			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		25.000				5.710			
	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur				128.000				33.480			
	Pengadaan Printer		Jumlah Pengadaan Printer		-				-			
	Pengadaan Alat-alat Studio		Jumlah Pengadaan Alat-alat Studio		-				-			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas		-				-			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor		33.000				10.000			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		70.000				19.080			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Kantor		-				-			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Elektronik Kantor		Jumlah Pemeliharaan Alat-alat Elektronik		5.000				4.400			
	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Pembangunan Gedung Kantor		-				-			
	Pengadaan Komputer		Jumlah Pengadaan Komputer		-				-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengadaan Meubelair (Kursi rapat)		Jumlah Pengadaan Meubelair	-				-				
	Pengadaan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000				-				
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor	-				-				
	Pembuatan Interior Ruang Aula		Jumlah Pembuatan Interior ruang Aula	-				-				
	Pengadaan Jaringan Internet		Jumlah Jaringan Internet	-				-				
	Rehabilitas Sedang / berat balai adat Kabupaten Sarolangun		Jumlah Rehabilitasi sedang / berat balai adat	-				-				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-				-				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-				-				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000				7.300				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50.000				7.300				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000				2175				
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD		Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan	20.000				2175				
	Penyusunan Lakip OPD		Jumlah jenis laporan	-				-				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah			30.000				-				
	Pameran Pembangunan		Jumlah pameran yang diadakan	15.000				-				
	Pawai Pembangunan		Jumlah pawai pembangunan yang diadakan	15.000				-				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			2.969.400				138.473				
	Lomba Desa		Jumlah desa yang dilombakan	150.000				29.741				
	Bulan Bhakti Gotong Royong		Jumlah desa yang dicanangkan pada BBGRM	280.000				5.883				
	Pemutakhiran Profil Desa		Tersedianya jumlah buku profil desa	99.400				24.877				
	Tim Fasilitas Kabupaten dan Kecamatan Alokasi Dana Desa (ADD)		Jumlah desa yang difasilitasi Alokasi Dana Desa	-				-				
	Tim Fasilitas Kabupaten dan Kecamatan Dana Desa (DD)		Jumlah desa yang difasilitasi Dana Desa	42.000				7.505				
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD dan DD		Tersedianya buku Juknis ADD dan DD	25.000				25.000				
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2DK		Tersedianya buku Juknis P2DK	-				-				
	Pembinaan dan Konsultasi P2DK		Jumlah Desa yang dibina	70.000				16.975				
	Pembinaan dan Konsultasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD		Jumlah Desa yang dibina	103.000				24.893				
	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa		Jumlah lembaga desa yang dibina	-				-				
	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa E-Voting		Jumlah desa yang mengadakan pilkades	-				-				
	Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa terpilih 2018		Jumlah Kades terpilih yang dilatih awal masa jabatan	50.000				-				
	Pelaksanaan Pemilihan Kades E-Voting dan Pelantikan Kades		Jumlah desa yang mengadakan pemilihan dan pelantikan kades terpilih	2.150.000				3.600				
	Tenaga Administrasi Pemutakhiran Profil Desa		Jumlah tenaga administrasi profil desa	-				-				
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			276.200				33.080				
	Pembinaan Posyantek dan Gelar Teknologi Tepat Guna		Jumlah Posyantek yang dibina	46.100				6.393				
	Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna		Jenis Alat yang diperagakan	150.100				4.400				
	Pembinaan Pokma Ekonomi Masyarakat		Jumlah Pokmas yang dibina	-				-				
	Pelatihan Pengurus BUMDES		Jumlah BUMDES yang dibina	80.000				22.287				
	Pembinaan Posyantek Desa		Jumlah Posyantek Desa	-				-				
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			205.000				46.560				
	Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Desa		Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti BinteK	-				-				
	Sosialisasi dan Hibridasi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Desa (ADD) dan P2DK		Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi	45.000				-				
	Sosialisasi BUMDES		Jumlah desa yang belum mengikuti sosialisasi	-				-				
	Rapat Koordinasi Kepala Desa / Lurah		Jumlah Kades / Lurah yang mengikuti Rakor	100.000				46.560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Desa		Jumlah Desa yang dibina	-				-				
	Pembinaan Perangkat Desa dan BPD		Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang dilatih	60.000				-				
	Inventarisasi Aset PNPMP/Integrasi dan SPP PNPMP/Integrasi		Terdapatnya Aset PNPMP/Integrasi dan PKKPM	-				-				
	Sosialisasi Peraturan tentang Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang ikut sosialisasi	-				-				
	Rakor Lembaga Adat Kabupaten		Jumlah Lembaga adat yang ikut	-				-				
	Bimbingan Teknis Kepala Desa dan Sekretaris Desa		Jumlah kades dan sekdes yang mengikuti Bimtek	-				-				
	Sosialisasi P2DK		Jumlah Kades yang mengikuti Sosialisasi	-				-				
	Peningkatan Kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat		Jumlah Kader KPMD	-				-				
	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas PNPMP		Jumlah Kelompok PNPMP yang dibina	-				-				
	Monitoring dan Pembinaan Perangkat Desa		Jumlah Perangkat Desa yang dibina	-				-				
	Tim Pembentukan Pelelakan, Pemekaran dan Penghapusan Desa		Jumlah desa yang terdata	-				-				
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			1.100.417				78.925				
	Dana Penunjang Sekretariat TP PKK Kab. Sarolangun		Tersedianya Dana Penunjang Sekre TP-PKK	470.417				71.775				
	Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten		Jumlah Kader PKK yang dilombakan Tk. Kabupaten	96.000				1.335				
	Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi		Jumlah Kader PKK yang dilombakan Tk. Provinsi	115.000				-				
	Jambore Kader PKK Tingkat Nasional		Jumlah Kader PKK yang dilombakan Tk. Nasional	130.000				-				
	HKG Tingkat Kabupaten		Pelaksanaan HKG PKK Tk. Kabupaten	26.000				-				
	HKG Tingkat Provinsi		Pelaksanaan HKG PKK Tk. Provinsi	28.000				-				
	HKG Tingkat Nasional		Pelaksanaan HKG PKK Tk. Nasional	62.000				-				
	Rakor TP. PKK Desa/Kelurahan seKabupaten Sarolangun		Jumlah TP. PKK yang mengikuti Rakor	25.000				-				
	Sosialisasi Pola Asuh anak dan Remaja		Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	22.000				2.742				
	Sosialisasi UP2K Tingkat Kabupaten		Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	25.000				2.229				
	Sosialisasi Halinya PKK		Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	24.000				-				
	Lomba Masak		Terlaksananya Lomba Masak	11.000				-				
	Sosialisasi Posyandu		Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	24.000				-				
	Lomba 10 Program Pokok PKK		Jumlah Kader yang mengikuti lomba	21.000				474				
	Lomba Busana		Jumlah Kader yang mengikuti lomba busana	21.000				370				
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			389.000				35.610				
	Lomba P2W-KSS		Jumlah Desa yang dilombakan	264.000				20.659				
	Lomba Posyandu		Jumlah Desa yang dilombakan	125.000				14.952				
	Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat		Jumlah Desa yang dilombakan	-				-				
	Program Pengembangan Nilai Budaya			197.280				30.353				
	Operasional Sekretariat Lembaga Adat Kabupaten		Tersedianya Operasional lembaga adat	95.000				8.054				
	Penyuluhan Hukum Adat		Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	64.000				13.400				
	Rapat Kerja Pengurus Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan		Jumlah pengurus lembaga adat kabupaten dan kecamatan	38.280				8.900				
	Workshop Lembaga Adat		Jumlah anggota lembaga adat yang mengikuti workshop	-				-				
	Insentif Pengurus Penyelesaian Sengketa Adat		Jumlah sengketa adat yang diselesaikan	-				-				
	Pemberian Gelar Adat dan Pengukuhan Gelar Adat		Terlaksananya Gelar Adat dan pengukuhan gelar adat	-				-				
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan lembaga adat		Jumlah peralatan dan perlengkapan lembaga adat	-				-				
	Penyuluhan Adat ke sekolah-sekolah		Jumlah sekolah yang diadakan penyuluhan	-				-				
	Sarana dan prasarana pusat informasi cagar budaya		Tersedianya sarana dan prasarana pusat informasi cagar budaya	-				-				
	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Percepatan Pembangunan Desa / Kelurahan (P2DK), ADD dan DD			260.760				46.141				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)		Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	60.000				-				
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK)		Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	50.000				6.781				
	Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Desa / Kelurahan P2DK		Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	100.000				27.870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi		Jumlah Desa yang menerima bantuan pusat dan daerah	-				-				
	Monitoring Pembinaan Perangkat Desa		Jumlah Desa yang monitoring dan dibina	50.760				-				
	Monitoring Pemilih Anggota BPD		Jumlah BPD yang mengikuti pemilihan	-				-				
	Pembinaan dan Pengawasan TKD Sawit		Jumlah TKD sawit yang dibina	-				-				
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PNPMD dan PKKPM		Jumlah Desa yang di bina	-				11.490				
	Koordinasi Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi		Jumlah Desa yang mendapat bantuan keuangan prov	-				-				
	Program Fasilitas Purna Tugas Kepala Desa			100.000				50.000				
	Penghargaan Purna Tugas kepala Desa		Jumlah Kades yang diberi penghargaan	100.000				50.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			-				-				
	Fasilitas Evaluasi Penyusunan APBDes		Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes	-				-				
	Fasilitas Pendampingan Desa		Jumlah Desa yang ikut pendampingan	-				-				
	Rakor Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa dan PLD		Jumlah Desa yang ikut rakor pendampingan	-				-				
	Pembinaan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		Jumlah BPD yang dilatih	-				-				
	Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan			-				-				
	Inventarisasi Data dan Pengukuran TKD Non Sawit		Jumlah TKD non sawit yang di ukur	-				-				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA Desa		Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan	-				-				
	Tim Pembentukan Pemetaan, Pemekaran dan Penghapusan Desa		Jumlah desa yang dimekarkan dan dihapus	-				-				
	Program Pengembangan Usaha Masyarakat Desa			130.000				34.171				
	Fasilitasi Pembentukan BUMDES		Jumlah BUMDES yang difasilitasi	130.000				34.171				
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang dikembangkan	-				-				
	Pengembangan Pasar Desa		Jumlah pasar desa yang dikembangkan	-				-				
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Aktivitas Ruang Belajar Masyarakat			-				-				
	Fasilitas Perpustakaan Desa		Jumlah Perpustakaan Desa yang difasilitasi	-				-				
	Penguatan Kelembagaan Aktifitas Belajar Masyarakat		Terciptanya minat baca masyarakat desa	-				-				
	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan			-				-				
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan		Jumlah Desa / Kelurahan yang dibina	-				-				
	Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa			50.000				13.603				
	Pembinaan dan Fasilitas Dana Desa (DD) dan Abkasi Dan Desa (ADD)		Jumlah Desa yang dibina dan difasilitasi	-				-				
	Pembinaan Dana Bantuan Provinsi		Jumlah Desa yang dibina	50.000				13.603				

Sarolangun, Juli 2022

KEPALA DINAS PMD
KAB. SAROLANGUN

MULYADI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670121 198810 1 001

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jambi (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2) melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari analisa terhadap pencapaian kinerja layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, terdapat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah :

1. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa
2. Belum efektifnya pembangunan kawasan perdesaan
3. Belum optimalnya penegasan batas antar desa
4. Belum semua desa memiliki kantor desa
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan urusan pemerintahan.
6. Belum tersedianya aplikasi desa (Siskeudes) secara online
7. Kurangnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui APBD
8. Masih banyaknya sengketa batas desa
9. Penataan dan peremajaan TKD
10. Adanya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang tidak sesuai dengan perencanaan
11. Adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran dikarenakan masih adanya keterkaitan pembayaran pajak bangunan
12. Masih adanya anggaran fasilitasi pengendalian stunting desa

13. Belum optimalnya peng-inputan profil desa / kelurahan
14. Belum optimalnya kegiatan TP-PKK / Kelurahan dan Desa Wisma
15. Rendahnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pilkades
16. Belum efektifnya Bumdesa dalam pengelolaan ekonomi masyarakat desa
17. Belum efektifnya pembangunan kawasan perdesaan
18. Belum efektifnya nomenklatur dan tupoksi Dinas PMD

Adapun isu strategis dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan SDM aparatur Pemdes
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
3. Penetapan kawasan perdesaan
4. Permendagri No. 45/2016
5. Penganggaran yang terbatas
6. Masih terdapat beberapa desa *blank spot*
7. Laporan keuangan desa belum tepat waktu
8. Pemahaman aparatur desa terhadap administrasi aset dan keuangan masih rendah
9. Penerima manfaat program belum memanfaatkan bantuan kearah maksimal
10. Sarolangun rawan stunting (Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting)
11. Data Desa/Kelurahan tidak menggambarkan yang senyatanya (Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan)
12. Rendahnya anggaran TP PKK dalam membantu sebagai mitra pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021)
13. E-voting dalam Pilkades
14. Bumdes unggulan (PP 71 Tahun 2020 tentang BUMDESA)
15. Kesesuaian nomenklatur dan tupoksi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Sarolangun dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (3) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan masyarakat;
- (4) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2) melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di masing-masing daerah;
- (2) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan *Outcome*, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegaitannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun;
- (3) Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun;

- (4) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Keterbukaan informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dari pemerintahan (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha / swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia / SDM (aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa dan

masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;

- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, maka program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama pemerintah kabupaten Sarolangun, dalam proses pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kabupaten Sarolangun.

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan misi yang sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa desa dan atau desa adat memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan “dirinya” menjadi desa yang lebih berdaya, maju dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan-kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pembentukan peraturan desa, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa /BUMDES), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPMD), penggalan dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya skala desa dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun melaksanakan langkah-langkah konkrit, antara lain :

Pertama, Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa;

Kedua, mengembangkan pembangunan desa melalui perekonomian masyarakat desa dan pemanfaatan TTG;

Ketiga menguatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kelembagaan masyarakat;

Selanjutnya, langkah-langkah tersebut dijabarkan kedalam alokasi anggaran program dan kegiatan.

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (Rp.000)	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas PMD	4.222.494	9.314.750	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas PMD	4.222.494	9.314.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Dokumen Perangkat Daerah Dinas PMD	9.900	151.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Dokumen Perangkat Daerah Dinas PMD	9.900	151.250	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA Dinas PMD	9.900	66.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA Dinas PMD	9.900	66.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Dok. Laporan capaian Kinerja dan khsar realisasi Kinerja Dinas PMD	-	31.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Dok. Laporan capaian Kinerja dan khsar realisasi Kinerja Dinas PMD	-	31.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Dok. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMD	-	21.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Dok. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMD	-	21.500	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas PMD	-	32.250	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas PMD	-	32.250	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Bulan Gaji dan tunjangan ASN	3.503.127	6.176.636	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Bulan Gaji dan tunjangan ASN	3.503.127	6.176.636	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	-	279.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	-	279.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Penerangan bangunan kantor	114.889	967.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Penerangan bangunan kantor	114.889	967.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5.003	10.750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5.003	10.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah jenis ATK yang tersedia	-	81.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah jenis ATK yang tersedia	-	81.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Jenis barang cetakan dan Penggandaan	2.077	86.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Jenis barang cetakan dan Penggandaan	2.077	86.000	
	Facilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1.799	75.250	Facilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1.799	75.250	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	6.010	129.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	6.010	129.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Facilitasi dukungan pelaksanaan SPBE Dinas PMD	100.000	530.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Facilitasi dukungan pelaksanaan SPBE Dinas PMD	100.000	530.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Tersedianya Administrasi Perkantoran	-	55.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah D	DPMD	Tersedianya Administrasi Perkantoran	-	55.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor, jumlah pengadaan AC			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor, jumlah pengadaan AC			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Tersedianya Administrasi Perkantoran			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Tersedianya Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	535.373	1.245.864	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	535.373	1.245.864	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan	5.434	10.750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan	5.434	10.750	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Tersedianya barang penunjang kegiatan kantor	442.320	898.614	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Tersedianya barang penunjang kegiatan kantor	442.320	898.614	
	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	DPMD	Jumlah kendaraan dinas operasional	59.205	279.500	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	DPMD	Jumlah kendaraan dinas operasional	59.205	279.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah gedung kantor yang terawat	54.200	107.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah gedung kantor yang terawat	54.200	107.500	
	Rata-rata capaian kinerja (%)					Rata-rata capaian kinerja (%)					
	Predikat kinerja					Predikat kinerja					
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					
	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah d	25.020	822.500	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemer	25.020	822.500	
	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	25.020	822.500	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	25.020	822.500	
	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi kawasan perdesaan	25.020	322.500	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi kawasan perdesaan	25.020	322.500	
	Rata-rata capaian kinerja (%)			-	500.000	Rata-rata capaian kinerja (%)			-	500.000	
	Predikat kinerja					Predikat kinerja					
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
1	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah d	4.315.854	11.377.500	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemer	4.315.854	11.377.500	
	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina penyelenggaraan ADM pemerintah desa	4.315.854	11.377.500	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina penyelenggaraan ADM pemerintah desa	4.315.854	11.377.500	
	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD	Jumlah produk hukum desa	-	550.000	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD	Jumlah produk hukum desa	-	550.000	
	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	29.228	250.000	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	29.228	250.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	DPMD	Jumlah Bumdes yang dilakukan pembinaan	2.025.714	975.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	DPMD	Jumlah Bumdes yang dilakukan pembinaan	2.025.714	975.000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	42.789	430.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	42.789	430.000	
	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD	Jumlah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan	2.084.120	6.950.000	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD	Jumlah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan	2.084.120	6.950.000	
	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah desa yang di data dan evaluasi perkembangan dan jumlah dokumen pr	28.999	322.500	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah desa yang di data dan evaluasi perkembangan dan jumlah doku	28.999	322.500	
	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah yang difasilitasi aset desa	50.003	450.000	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah yang difasilitasi aset desa	50.003	450.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan	25.003	500.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan	25.003	500.000	
	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah fasilitasi perkembangan dan lomba desa	-	350.000	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah fasilitasi perkembangan dan lomba desa	-	350.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rata-rata capaian kinerja (%)			29.998	600.000	Rata-rata capaian kinerja (%)			29.998	600.000	
	Predikat kinerja					Predikat kinerja					
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	DPMD				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	DPMD				
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota	DPMD	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	274.174	2.617.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota	DPMD	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	274.174	2.617.500	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	274.174	2.617.500	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	274.174	2.617.500	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Jumlah usaha ekonomi masyarakat desa	91.998	600.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Jumlah usaha ekonomi masyarakat desa	91.998	600.000	
	Fasilitas Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Jumlah TTG yang dilombakan dan jumlah TTG yang di manfaatkan	23.655	430.000	Fasilitas Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Jumlah TTG yang dilombakan dan jumlah TTG yang di manfaatkan	23.655	430.000	
	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	8.522	537.500	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	8.522	537.500	
	Fasilitas Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi dan pembinaan	24.999	800.000	Fasilitas Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi dan pembinaan	24.999	800.000	
	Rata-rata capaian kinerja (%)					Rata-rata capaian kinerja (%)					
	Predikat kinerja					Predikat kinerja					

Sarolangun, Juli 2022

KEPALA DINAS PMD
KAB. SAROLANGUN

MULYADI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670121 198810 1 001

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pemberdayaan masyarakat, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program / kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Sarolangun dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam musrenbang mulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kabupaten Sarolangun.

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas PMD	4.222.494	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Dokumen Perangkat Daerah Dinas PMD	9.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA Dinas PMD	9.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Dok. Laporan capaian Kinerja dan khisar realisasi Kinerja Dinas PMD	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Dok. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMD	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas PMD	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Bulan Gaji dan tunjangan ASN	3.503.127	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Penerangan bangunan kantor	114.889	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5.003	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah jenis ATK yang tersedia	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Jenis barang cetakan dan Penggandaan	2.077	
	Facilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1.799	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	6.010	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Facilitasi dukungan pelaksanaan SPBE Dinas PMD	100.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Tersedianya Administrasi Perkantoran	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor, jumlah pengadaan AC		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Tersedianya Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	535.373	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan	5.434	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Tersedianya barang penunjang kegiatan kantor	442.320	
	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	DPMD	Jumlah kendaraan dinas operasional	59.205	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah gedung kantor yang dirawat	54.200	
	Rata-rata capaian kinerja (%)				
	Predikat kinerja				
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah d	25.020	
	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	25.020	
	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi kawasan perdesaan	25.020	
	Rata-rata capaian kinerja (%)			-	
	Predikat kinerja				
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
1	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina administrasi penyelenggaraan ADM pemerintah d	4.315.854	
	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina penyelenggaraan ADM pemerintah desa	4.315.854	
	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD	Jumlah produk hukum desa	-	
	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	29.228	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	DPMD	Jumlah Bumdes yang dilakukan pembinaan	2.025.714	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	42.789	
	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD	Jumlah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan	2.084.120	
	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah desa yang di data dan evaluasi perkembangan dan jumlah dokumen pr	28.999	
	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah yang difasilitasi aset desa	50.003	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan	25.003	
	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah fasilitasi perkembangan dan lomba desa	-	
	Rata-rata capaian kinerja (%)			29.996	
	Predikat kinerja				

1	2	3	4	5	6
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	DPMD			
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota	DPMD	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	274.174	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	274.174	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Jumlah usaha ekonomi masyarakat desa	91.998	
	Fasilitasi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Jumlah TTG yang dilombakan dan jumlah TTG yang di manfaatkan	23.655	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	8.522	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	DPMD	Jumlah desa yang difasilitasi dan pembinaan	24.999	
	Rata-rata capaian kinerja (%)				
	Predikat kinerja				

Sarolangun, Juli 2022

KEPALA DINAS PMD
KAB. SAROLANGUN

MULYADI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670121 198810 1 001

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun berpedoman sebagaimana kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi maupun Kabupaten Sarolangun salah satu agenda pembangunan global dalam *Millenium Devlopment Goals* (MDG's) dan *Sustainable Development Gial's* (SDG's) adalah menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) / AEC (*ASEAN Economic Community*) yang akan memicu daya saing nasional, daerah maupun desa.

Prioritas pembangunan nasional adalah 9 (sembilan) agenda prioritas yang di implementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah beserta desa. Hal tersebut dilaksanakan sesuai semangat dan amanah dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di tingkat daerah, pemerintah Provinsi Jambi berupaya melaksanakan strategi poko pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), kesetaraan antar generasi (*intergenerational equity*) dan kesetaraan gender.

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun tahun 2023 mengacu pada Reviu Rencan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.

Dimana dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2023-2026 adalah :

1. Meningkatkan rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan pelaksanaan program-program / kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
4. Terciptanya tertib administrasi dan keuangan untuk menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan sasaran strategi tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Mengedepankan fasilitas untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan secara sinergis dalam melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam koordinasi, konsultasi antara pusat dan daerah dalam menetapkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun. Maka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan proses pembangunan.
2. Mengembangkan usaha dengan memperhitungkan aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesinambungan dan peran serta masyarakat.

3. Mengembangkan kemampuan pemerintahan desa dan kewenangan yang diserahkan dalam penguatan kelembagaan kemasyarakatan agar terciptanya kompetensi aparatur dalam pemberdayaan masyarakat.

1.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sarolangun serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) : tahun 2022, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah kabupaten Sarolangun.

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

- a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Daeralam Daerah Kabupaten / Kota

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sarolangun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	60 Perbup	158 Desa/Ke	49,799,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	55,000,000
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	57 Dokumen	158 Desa/Ke	56,999,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	62,700,000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	149 Desa	158 Desa/Ke	2,175,997,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	2,393,600,000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	57 Orang	158 Desa/Ke	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	110,000,000
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	80 BUMDESA	158 Desa/Ke	59,991,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	66,000,000
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	158 Desa/Ke	158 Desa/Ke	79,995,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	88,000,000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah yang di Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	149 Desa	158 Desa/Ke	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	55,000,000
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	60 Orang	158 Desa/Ke	49,998,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sarolangun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Jumlah fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	20 Desa	158 Desa/Ke	29,997,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	88 %	33,000,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1,397,999,200							1,540,000,000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,397,999,200							1,540,000,000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	11 Kegiatan	158 Desa/Ke	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	12 %	99,000,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	90 Desa	158 Desa/Ke	39,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	12 %	44,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	40 Desa	158 Desa/Ke	197,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	12 %	220,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	158 Desa/Ke	158 Desa/Ke	999,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	12 %	1,100,000,000
2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	11 Kecamatan	158 Desa/Ke	69,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	12 %	77,000,000
TOTAL										9,420,706,002							10,395,543,254

